

**PERAN AKTOR PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
DI TIGA PROVINSI THAILAND SELATAN**

(Tesis)

Oleh :

LOOKMAN SOO

NPM:2326061014



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PERAN AKTOR PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
DI TIGA PROVINSI THAILAND SELATAN**

Oleh

LOOKMAN SOO

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ADMINISTRAS**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN AKTOR PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI TIGA PROVINSI THAILAND SELATAN

Oleh

Lookman Soo

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktor pemerintah dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan, khususnya di Pattani, Yala, dan Narathiwat, yang merupakan konflik kompleks dan multidimensional akibat faktor identitas, politik, keamanan, dan sosial ekonomi sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional, serta dianalisis menggunakan teori konflik, resolusi konflik, dan administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melibatkan SBPAC sebagai lembaga administratif, ISOC sebagai lembaga keamanan, dan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan, dengan ISOC memiliki peran yang lebih dominan sehingga pendekatan keamanan lebih diutamakan, sementara SBPAC dan pemerintah daerah berperan dalam pembangunan sosial ekonomi dan membangun kepercayaan masyarakat. Namun, koordinasi antarlembaga masih belum optimal, ditandai dengan tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinergi, serta belum mampu mengatasi hambatan seperti rendahnya kepercayaan masyarakat dan birokrasi yang terpusat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik masih berorientasi pada *negative peace* dan belum sepenuhnya menyentuh akar konflik secara menyeluruh.

Kata Kunci:

Konflik Thailand Selatan, aktor pemerintah, resolusi konflik, birokrasi, keamanan, koordinasi kelembagaan

ABSTRACT

THE ROLE OF GOVERNMENT ACTORS IN CONFLICT RESOLUTION IN THE THREE SOUTHERN PROVINCES OF THAILAND

By

Lookman Soo

This study aims to analyze the role of government actors in resolving the conflict in Southern Thailand, particularly in Pattani, Yala, and Narathiwat, where the conflict is complex and multidimensional, influenced by identity, political, security, and socio-economic factors, thus requiring a comprehensive and integrated policy approach. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through a literature review of books, academic journals, and reports from relevant international institutions, and is analyzed using conflict theory, conflict resolution theory, and public administration theory. The findings indicate that conflict resolution involves several government actors, namely SBPAC as an administrative institution, ISOC as a security institution, and local governments as policy implementers, with ISOC playing a more dominant role that results in a security-oriented approach, while SBPAC and local governments contribute through socio-economic development and efforts to build public trust. However, coordination among institutions remains suboptimal, as indicated by overlapping authority and lack of synergy, and supporting factors such as government commitment have not been sufficient to overcome challenges such as low public trust and centralized bureaucracy; therefore, conflict resolution remains oriented toward negative peace and has not fully addressed the root causes of the conflict.

Keywords:

Southern Thailand conflict, government actors, conflict resolution, bureaucracy, security, institutional coordination

Judul Tesis : **PERAN AKTOR PEMERINTAH DALAM
PENYULESAIAN KONFLIK DI TIGA
PROVINSI THAILAND SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Lookman Soo**

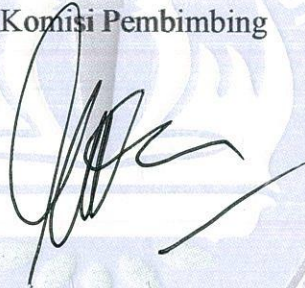
NPM : 2326061014

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYUTUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.
NIP. 196908151997032001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung



Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.
NIP. 196908151997032001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua : Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H

Penguji Utama : Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP 197608212000032001

3. **Direktor Program Pascasarjana Universitas Lampung**

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 1964032619021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 April 2026

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul " **PERAN ATOR PEMERINTAH DALAM PENYULESAIAN KONFLIK DI TIGA PROVINSI THAILAND SELATAN** " adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.

2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya: saya bersedia sanggup dituntut sesuai hokum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 April 2026

Yang Membuat Pernyataan



LOOKMAN SOO
NPM:2326061014

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Narathiwat Thailan pada 24 Jun 1992.

Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, putra dari Bapak Abd.Razaq dan Ibu Faridah.

Penulis Menempuh Pendidikan Sarjana Jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Pendidikan Agama Islam

Universitas Islam sumatra Utara lulus tahun 2022. Tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Ketertarikan penulis terhadap kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang Peran Aktor Pemerintah, didorong oleh pengalaman dan Faktor-faktor Konflik yang menjadi perpajangan. Keterkaitan antara pengalaman tersebut dengan topik penelitian ini menjadi dasar dalam penyusunan tesis.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta,
yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan tanpa
henti.

Terima kasih atas segala cinta yang tidak pernah putus dalam setiap langkah hidup
saya.

Keluarga dan saudara-saudara saya,
yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan kebahagiaan dalam setiap proses
yang saya jalani.

Dosen pembimbing dan seluruh dosen,
yang telah dengan sabar membimbing, memberikan ilmu, serta arahan sehingga
tesis ini dapat terselesaikan.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan,
yang selalu menemani, membantu, dan memberi semangat dalam suka maupun
duka selama proses penyusunan tesis ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu,
yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian karya ini.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal untuk
perjalanan yang lebih baik ke depannya.

MOTTO

“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

“Perubahan besar dimulai dari keberanian memahami masalah dan konsisten mencari solusi.”

“Ilmu adalah jalan, ketekunan adalah kunci, dan keberhasilan adalah hasil dari keduanya.”

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penyusunan tesis yang berjudul “Peran Aktor Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Di Tiga Provinsi Thailand Selatan” merupakan proses akademik yang penuh pembelajaran, ketekunan, dan tanggung jawab penulis untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terutama dan istimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, yang tak pernah lelah memberikan cinta, perhatian, dan pengorbanan tanpa batas. Terima kasih atas setiap perjuangan, kesabaran, dan kasih sayang yang selalu mengiringi langkah penulis hingga sampai di titik ini.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung, yang menjadi kunci dalam keberhasilan suatu perguruan tinggi.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. Direktur Program Pascasarjana, sebagai penjaminan mutu perguruan tinggi yang memperkuat daya saing regional dan internasional.
4. Bapak Prof. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung yang telah memberikan dukungan dan perhatian dalam pengembangan kegiatan akademik serta kemahasiswaan.
5. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah mendukung dan memfasilitasi kebutuhan akademik dalam pelaksanaan studi dan penelitian ini.
6. Ibu Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H., selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Administrasi, Sebagai pembimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan tesis ini.
7. Ibu Prof. Intan Fitri Muetia, S.A.N.,M.A.,Ph.D. selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Magister Ilmu Administrasi FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan ini.
9. Universitas Lampung atas kepercayaan dan pemberian beasiswa. Tanpa dukungan tersebut, perjalanan akademis hingga kelulusan ini tidak mungkin

dapat tercapai.

10. PKLI (Pengembangan Kerja sama dan Layanan Internasional) yang telah mengurus urusan pribadi adapun akademik dan membantu selama penulis menyelesaikan masa pendidikan.
11. Persatuan Mahasiswa Melayu Patani di Indonesia (PMMPI) yang selalu mendorong dan membantu segala akses sejak awal sampai akhir perkuliahanku.
12. Teman seperjuangan Magister Ilmu Administrasi Angkatan 2023 dan teman-teman Magister Ilmu Administrasi Angkatan 2025 yang selalu mendukung penulis untuk berjuang
13. Teruntuk diriku sendiri, aku bangga atas setiap langkah kecil yang telah ditempuh, setiap usaha yang tidak terlihat, serta setiap air mata dan doa yang mengiringi perjalanan ini. Semua itu menjadi bukti bahwa aku mampu bertahan, berjuang, dan pantas menikmati kebahagiaan atas proses yang telah dilalui.

Bandar Lampung, 20 April 2026

Penulis,

LOOKMAN SOO

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Teori Konflik.....	10
2.2 Teori Resolusi Konflik	11
2.3 Teori Peran Aktor Pemerintah.....	14
2.4 Teori Birokrasi	16
2.5 Kerangka Pemikiran	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
3.2 Fokus Penelitian	21
3.3 Lokasi dan Objek Penelitian	22

3.4 Jenis dan Sumber Data	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data	23
3.6 Teknik Analisis Data	26
3.7 Teknik Keabsahan Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Gambaran Umum Wilayah Konflik di Thailand Selatan	28
4.1.1 Sejarah Wilayah Pattani	29
4.1.2 Kondisi Sosial dan Demografi	31
4.1.3 Kondisi Politik dan Keamanan	32
4.1.4 Dinamika Konflik di Thailand Selatan	35
4.2 Peran Aktor Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik di Thailand Selatan	38
4.2.1 Peran Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC).....	39
4.2.2 Peran Internal Security Operations Command (ISOC).....	45
4.2.3 Peran Pemerintah Daerah.....	51
4.2.4 Peran Pemerintah Thailand dalam Proses Dialog Perdamaian	55
4.3 Mekanisme Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah	59
4.3.1 Koordinasi antara Lembaga Keamanan dan Administratif.....	59
4.3.2 Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	62
4.3.3 Forum Koordinasi Kebijakan Penyelesaian Konflik.....	64
4.3.4 Tantangan dalam Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah	66
4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Aktor Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik.....	76
4.4.1 Faktor Pendukung	76
4.4.2 Faktor Penghambat.....	79
4.5 Peran Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Penyelesaian Konflik.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Rekomendasi	88
DAFTAR PUSTAKA	89

TABEL

1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
3.1 Studi Literatur.....	24
4.1 Kronologi Konflik di Thailand Selatan.....	30
4.2 Jumlah Insiden Kekerasan dan Korban Konflik di Thailand Selatan(2004– 2023)	34
4.3 Progam dan Peran Pusat Administrasi Provinsi Perbatasan Selatan(SBPAC)	41
4.4 Peran dan Kegiatan ISOC dalam Penanganan Konflik.....	47
4.5 Peran dan Program Pemerintah Daerah	53
4.6 Proses Dialog Perdamaian Thailand Selatan (2013–Sekarang).....	57
4.7 Bentuk Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah	74
4.8 Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelesaian Konflik	76

GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
4.1 Peta Penduduk Thailand Selatan.....	28
4.2 Program restorasi sawah yang terbengkalai.....	43
4.3 Program Pengembangan UMKM & OTOP.....	43
4.4 Program pendidikan SBPAC.....	44
4.5 Program Masyarakat Multikultural.....	44
4.6 Kegiatan administrasi.....	45
4.7 Berdasarkan konteks konflik wilayah Thailand Selatan.....	49
4.8 Operasi koordinasi keamanan ISOC.....	49
4.9 Human Rights Watch / Reuters.....	50
4.10 Keamanan Sekolah.....	50
4.11 Operasi Penggeledahan & Penangkapan.....	51
4.12 Keterangan: Mekanisme Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah.....	59
4.13 Struktur Birokrasi Pemerintah dalam Penanganan Konflik.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Konflik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan merupakan salah satu konflik berkepanjangan di kawasan Asia Tenggara yang hingga saat ini belum sepenuhnya terselesaikan. Konflik tersebut terutama terjadi di tiga provinsi utama yaitu Pattani, Yala, dan Narathiwat. Wilayah ini sering disebut sebagai “*Deep South Thailand*” atau Thailand Selatan bagian dalam. Konflik yang terjadi di kawasan tersebut melibatkan berbagai aktor, termasuk kelompok separatis Melayu Muslim, aparat keamanan negara, serta masyarakat sipil yang terdampak oleh kekerasan berkepanjangan.

Secara historis, konflik di Thailand Selatan memiliki akar yang panjang yang berkaitan dengan sejarah politik wilayah Pattani sebagai bagian dari kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri secara independen sebelum diintegrasikan ke dalam negara Thailand modern. Wilayah Pattani pada masa lalu dikenal sebagai bagian dari *Kesultanan Pattani*, sebuah kerajaan Melayu Islam yang berkembang sejak abad ke-15 dan memiliki hubungan perdagangan serta politik dengan berbagai kerajaan di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan penting serta pusat penyebaran Islam di wilayah Semenanjung Melayu (Ibrahim, 2015).

Namun, pada akhir abad ke-18 wilayah Pattani mulai berada di bawah pengaruh kuat kerajaan Siam. Pada tahun 1785 kerajaan Siam berhasil menaklukkan Pattani dan menjadikannya sebagai wilayah vasal. Proses integrasi wilayah Pattani ke dalam negara Thailand semakin diperkuat melalui *Anglo-Siamese Treaty of 1909*, yang secara resmi menetapkan wilayah Pattani sebagai bagian dari Siam. Perjanjian ini juga memisahkan wilayah Pattani dari wilayah Melayu

lainnya seperti Kelantan dan Terengganu yang kemudian berada di bawah kekuasaan Inggris di Malaya. Sejak saat itu, wilayah Pattani menjadi bagian dari negara Thailand modern meskipun memiliki perbedaan identitas etnis, bahasa, dan agama dengan mayoritas masyarakat Thailand (McCargo, 2008).

Selain melalui perjanjian tersebut, proses integrasi juga diikuti oleh kebijakan sentralisasi yang semakin menguat pada awal abad ke-20. Pemerintah Siam menerapkan sistem administratif *Monthon* untuk memperkuat kontrol pusat terhadap wilayah-wilayah pinggiran, termasuk Pattani. Kebijakan ini mengurangi otonomi lokal dan menggantinya dengan struktur birokrasi yang dikendalikan oleh pemerintah pusat, yang dalam jangka panjang mempengaruhi hubungan antara negara dan masyarakat lokal (McCargo, 2008).

Pada periode selanjutnya, khususnya pada masa pemerintahan *Plaek Phibunsongkhram*, kebijakan nasionalisme Thailand diperkuat melalui program *Thaification*. Kebijakan ini menekankan penggunaan bahasa Thai dan identitas nasional tunggal, yang dalam konteks Thailand Selatan dipandang sebagai bentuk asimilasi yang mengancam identitas budaya dan agama masyarakat Melayu Muslim (Askew, 2008).

Perbedaan identitas tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika konflik di wilayah Thailand Selatan. Mayoritas penduduk di Pattani, Yala, dan Narathiwat merupakan etnis Melayu yang beragama Islam, sedangkan sebagian besar penduduk Thailand beragama Buddha dan menggunakan bahasa Thai sebagai bahasa nasional. Dalam konteks negara bangsa modern, pemerintah Thailand menerapkan berbagai kebijakan nasionalisme yang bertujuan memperkuat integrasi nasional, termasuk penggunaan bahasa Thai dalam pendidikan dan administrasi pemerintahan. Namun, kebijakan tersebut dalam beberapa kasus dipandang oleh masyarakat Melayu Pattani sebagai bentuk marginalisasi terhadap identitas budaya dan agama mereka (Askew, 2008).

Menurut Duncan McCargo, konflik di Thailand Selatan tidak hanya berkaitan dengan faktor agama, tetapi juga dengan persoalan legitimasi politik antara negara Thailand dan masyarakat Melayu Muslim di wilayah tersebut. McCargo

menjelaskan bahwa sebagian masyarakat Pattani memandang pemerintahan Thailand sebagai kekuasaan yang tidak sepenuhnya memiliki legitimasi historis di wilayah tersebut. Hal ini kemudian berkontribusi terhadap munculnya berbagai bentuk resistensi terhadap negara (McCargo, 2008).

Dalam perkembangan selanjutnya, ketegangan antara pemerintah Thailand dan masyarakat lokal di wilayah selatan memunculkan berbagai gerakan politik yang menuntut otonomi atau bahkan kemerdekaan bagi wilayah Pattani. Sejak pertengahan abad ke-20 muncul sejumlah organisasi yang memperjuangkan agenda tersebut, seperti Barisan Revolusi Nasional dan Pattani United Liberation Organization. Kelompok-kelompok ini menentang pemerintahan Thailand dan memperjuangkan pembentukan negara Pattani yang merdeka atau memperoleh otonomi yang lebih luas.

Meskipun aktivitas kelompok separatis sempat mengalami penurunan pada akhir abad ke-20, konflik kembali meningkat secara signifikan pada awal abad ke-21. Gelombang baru kekerasan dimulai pada tahun 2004 setelah terjadinya serangan terhadap kamp militer di Narathiwat yang menyebabkan pencurian ratusan senjata militer. Peristiwa ini menandai eskalasi baru konflik bersenjata antara kelompok pemberontak dan aparat keamanan Thailand (Jitpiromsri & McCargo, 2010).

Pada tahun yang sama terjadi beberapa peristiwa penting yang memperburuk situasi keamanan di wilayah Thailand Selatan. Salah satu peristiwa tersebut adalah bentrokan antara militan dan aparat keamanan di *Krue Se Mosque* pada April 2004 yang menewaskan puluhan orang. Selain itu, insiden *Tak Bai* pada Oktober 2004 juga menjadi salah satu peristiwa yang memperdalam ketegangan antara masyarakat lokal dan pemerintah Thailand. Dalam insiden tersebut, puluhan demonstran Muslim meninggal dunia setelah ditahan oleh aparat keamanan Thailand (Chambers, Jitpiromsri, & Waitoolkiat, 2019).

Sejak meningkatnya konflik pada tahun 2004, ribuan insiden kekerasan telah terjadi di wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat. Berdasarkan berbagai laporan penelitian, konflik di Thailand Selatan telah menyebabkan ribuan korban jiwa

serta puluhan ribu orang mengalami luka-luka. Kekerasan yang terjadi tidak hanya menyoasar aparat keamanan, tetapi juga masyarakat sipil seperti guru, tokoh agama, dan warga lokal yang dianggap memiliki hubungan dengan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan rasa ketidakamanan yang tinggi di masyarakat serta berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam menghadapi konflik tersebut, pemerintah Thailand menerapkan berbagai strategi untuk mengendalikan situasi keamanan di wilayah selatan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berupa operasi militer dan keamanan, tetapi juga mencakup program pembangunan ekonomi serta upaya dialog damai dengan kelompok pemberontak. Pemerintah Thailand juga membentuk berbagai lembaga khusus untuk menangani konflik di wilayah selatan, termasuk badan administratif dan struktur koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Namun demikian, efektivitas kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Thailand Selatan masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang terlalu dominan seringkali tidak mampu menyelesaikan akar masalah konflik yang berkaitan dengan identitas, politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara (Melvin, 2007). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan berbagai aktor pemerintah serta mekanisme koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga negara.

Dalam konteks penyelesaian konflik, peran aktor pemerintah menjadi sangat penting karena pemerintah memiliki kewenangan utama dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program, serta mengoordinasikan berbagai upaya penyelesaian konflik. Aktor pemerintah yang terlibat dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan meliputi lembaga keamanan, lembaga administratif, serta badan-badan khusus yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan dialog perdamaian di wilayah tersebut.

Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi faktor penting

dalam keberhasilan kebijakan penyelesaian konflik. Kompleksitas konflik di Thailand Selatan menuntut adanya kerja sama yang efektif antara berbagai institusi pemerintah agar kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan yang dirancang oleh pemerintah berpotensi mengalami tumpang tindih atau tidak berjalan secara optimal.

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian konflik adalah struktur birokrasi pemerintah yang mengatur pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Struktur birokrasi yang kompleks dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan penyelesaian konflik di wilayah Thailand Selatan. Dalam beberapa kasus, perbedaan kepentingan antar lembaga pemerintah juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana peran aktor pemerintah dalam penyelesaian konflik di wilayah Thailand Selatan, khususnya di tiga provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana aktor pemerintah berperan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penyelesaian konflik, bagaimana mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah berjalan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam proses penyelesaian konflik di wilayah tersebut.

Dengan memahami dinamika peran aktor pemerintah dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian konflik dan kebijakan publik, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran aktor Pemerintah dalam penyelesaian konflik di tiga provinsi Thailand Selatan?
2. Bagaimana mekanisme koordinasi antar lembaga Pemerintah dalam penyelesaian konflik?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat aktor Pemerintah dalam penyelesaian konflik di wilayah tersebut?
4. Bagaimana Peran struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan penyelesaian konflik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Peran Aktor pemerintah dalam penyelesaian konflik di tiga provinsi Thailand Selatan.
2. Mengkaji mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penyelesaian konflik
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Aktor pemerintah.
4. Menganalisis peran struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penyelesaian konflik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Administrasi Publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik pada wilayah konflik, serta memperluas penerapan teori implementasi kebijakan dalam konteks konflik regional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penyelesaian konflik serta memperbaiki tata kelola kebijakan di wilayah rawan konflik.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang mengkaji kebijakan publik dan konflik dalam perspektif Administrasi Publik.

1.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul/Fokus Penelitian	Hasil Utama	Relevansi
1	Arifi & Mulyana	Kompleksitas konflik Thailand Selatan	Konflik dipengaruhi faktor internal & eksternal	Dasar konflik multidimensional
2	Puspitasari dkk. (2024)	Peacebuilding non-keamanan	Pariwisata halal bantu stabilitas	Peran aktor non-militer
3	Faisal Abdau (2017)	Peran militer vs sipil	Militer dominan	Dominasi pendekatan keamanan
4	Studi SBPAC	Peran administratif	Fokus pembangunan sosial	Peran aktor administratif
5	Studi diskriminasi	Hambatan konflik	Rendahnya kepercayaan publik	Faktor penghambat
6	McCargo (2008)	Politik Thailand Selatan	Negara vs identitas lokal	Konflik identitas

7	Askew (2010)	Dinamika kekerasan	Konflik berulang	Ketidakstabilan keamanan
8	Chalk (2008)	Insurgensi Thailand Selatan	Gerakan separatis	Peran keamanan negara
9	Abuza (2011)	Terorisme Asia Tenggara	Jaringan militan	Pendekatan keamanan
10	Liow (2006)	Islam & politik Thailand	Marginalisasi Muslim	Akar konflik identitas
11	ICG (2012)	Resolusi konflik Thailand Selatan	Dialog perdamaian belum optimal	Pentingnya negosiasi
12	Melvin (2007)	Kebijakan keamanan	Militerisasi wilayah	Dominasi negara
13	Funston (2008)	Politik etnis	Ketimpangan kebijakan	Konflik struktural
14	Horiba (2003)	Sejarah Pattani	Integrasi paksa	Akar historis konflik
15	Connors (2005)	Demokrasi Thailand	Kelemahan institusi	Peran negara lemah
16	Croissant (2007)	Konflik internal	Negara vs kelompok minoritas	Konflik etnis
17	Burke et al. (2013)	Pembangunan & konflik	Ketimpangan ekonomi	Faktor sosial ekonomi
18	Yusuf & Pathan (2015)	Pendidikan & konflik	Pendidikan jadi alat resolusi	Peran non-keamanan
19	Abdullah (2016)	Peran lokal	Pemerintah daerah terbatas	Desentralisasi lemah
20	Deep South Watch	Monitoring konflik	Data kekerasan tinggi	Evaluasi kebijakan pemerintah

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian lebih banyak membahas mengenai penyebab konflik, dinamika kelompok pemberontak, serta dampak konflik terhadap masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis peran aktor pemerintah dalam perspektif administrasi publik, terutama terkait koordinasi antar lembaga dan struktur birokrasi dalam penyelesaian konflik, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis peran aktor pemerintah dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Konflik

Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Konflik biasanya muncul akibat adanya perbedaan kepentingan, nilai, identitas, maupun distribusi sumber daya antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks politik dan hubungan sosial, konflik sering terjadi ketika terdapat ketidakpuasan terhadap sistem kekuasaan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Menurut Lewis A. Coser, konflik merupakan suatu proses sosial yang terjadi ketika individu atau kelompok memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Coser menjelaskan bahwa konflik tidak selalu bersifat negatif karena dalam beberapa kondisi konflik dapat mendorong perubahan sosial dan memperkuat solidaritas kelompok dalam masyarakat (Coser, 1956). Dalam perspektif ini, konflik dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan ketidakpuasan serta memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, Johan Galtung mengemukakan konsep segitiga konflik (*conflict triangle*) yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu kontradiksi (*contradiction*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*). Kontradiksi merujuk pada ketidaksesuaian kepentingan antara pihak-pihak yang berkonflik, sikap berkaitan dengan persepsi atau pandangan negatif terhadap pihak lain, sedangkan perilaku berkaitan dengan tindakan nyata yang dilakukan dalam konflik, seperti kekerasan atau tindakan perlawanan (Galtung, 1996). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan dapat memperkuat dinamika konflik apabila tidak dikelola dengan baik.

Selanjutnya, Ted Robert Gurr menjelaskan konflik melalui konsep *relative deprivation*, yaitu kondisi ketika suatu kelompok merasa bahwa mereka tidak

memperoleh hak atau kesempatan yang seharusnya mereka dapatkan. Ketidakpuasan terhadap kondisi tersebut dapat memicu munculnya protes sosial, pemberontakan, maupun konflik politik (Gurr, 2015). Dalam konteks konflik Thailand Selatan, konsep *relative deprivation* dapat digunakan untuk menjelaskan perasaan marginalisasi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Melayu Muslim terhadap kebijakan pemerintah Thailand.

Selain itu, konflik juga dapat dipahami sebagai akibat dari perbedaan identitas etnis, agama, dan budaya. Dalam banyak kasus konflik etnis, perbedaan identitas sering kali menjadi faktor yang memperkuat konflik politik dan sosial. Identitas kelompok dapat menjadi sumber solidaritas internal, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan dengan kelompok lain apabila terjadi diskriminasi atau ketidakadilan dalam sistem politik.

Dalam konteks konflik di Thailand Selatan, konflik tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga berkaitan dengan identitas etnis dan agama masyarakat Melayu Muslim yang memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Thailand pada umumnya. Kebijakan integrasi nasional yang diterapkan oleh pemerintah Thailand sering kali dipandang oleh sebagian masyarakat lokal sebagai bentuk marginalisasi terhadap identitas budaya mereka (McCargo, 2008).

Dengan demikian, teori konflik memberikan kerangka analisis yang penting untuk memahami dinamika konflik di Thailand Selatan. Konflik yang terjadi di wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara faktor politik, sosial, budaya, serta kebijakan pemerintah yang memengaruhi hubungan antara negara dan masyarakat lokal.

2.2 Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan konflik secara damai dengan mengidentifikasi dan mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan konflik tersebut. Resolusi konflik tidak hanya bertujuan untuk menghentikan kekerasan, tetapi juga untuk menciptakan

kondisi yang memungkinkan terciptanya perdamaian yang berkelanjutan antara pihak-pihak yang berkonflik. Menurut John Burton, konflik seringkali muncul karena kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Burton menjelaskan bahwa kebutuhan dasar seperti identitas, keamanan, pengakuan, dan partisipasi politik merupakan kebutuhan yang tidak dapat dinegosiasikan. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka konflik akan terus muncul dalam berbagai bentuk, baik konflik sosial maupun konflik politik (Burton, 1990). Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar kelompok yang terlibat dalam konflik.

Selain itu, Johan Galtung mengemukakan konsep perdamaian yang dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *negative peace* dan *positive peace*. *Negative peace* merujuk pada kondisi di mana kekerasan fisik telah berhenti, namun penyebab utama konflik belum sepenuhnya diselesaikan. Sementara itu, *positive peace* merujuk pada kondisi di mana konflik telah diselesaikan secara menyeluruh melalui keadilan sosial, pembangunan ekonomi, serta hubungan yang harmonis antara kelompok yang sebelumnya berkonflik (Galtung, 1996). Dalam konteks ini, penyelesaian konflik yang efektif harus mampu mencapai kondisi *positive peace* agar konflik tidak kembali muncul di masa depan.

Selanjutnya, John Paul Lederach memperkenalkan konsep *conflict transformation* yang menekankan pentingnya perubahan hubungan sosial dan struktur yang menyebabkan konflik. Lederach menjelaskan bahwa resolusi konflik tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah dalam jangka pendek, tetapi juga pada transformasi hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik dalam jangka panjang (Lederach, 2003). Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses penyelesaian konflik, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, serta kelompok yang terlibat dalam konflik.

Selain pendekatan tersebut, resolusi konflik juga dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti negosiasi, mediasi, dan dialog antara pihak-pihak

yang berkonflik. Negosiasi merupakan proses komunikasi langsung antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan. Sementara itu, dialog merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian antara pihak-pihak yang berkonflik.

Dalam banyak kasus konflik internal, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam proses resolusi konflik. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah konflik. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program pembangunan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah konflik.

Dalam konteks konflik di Thailand Selatan, pendekatan resolusi konflik telah dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah, termasuk operasi keamanan, pembangunan ekonomi, serta upaya dialog antara pemerintah dan kelompok pemberontak. Namun demikian, proses penyelesaian konflik di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kompleksitas birokrasi, serta dinamika politik yang memengaruhi kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Thailand Selatan memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai aktor serta mempertimbangkan faktor politik, sosial, dan budaya yang memengaruhi dinamika konflik. Pendekatan resolusi konflik yang efektif diharapkan dapat menciptakan stabilitas keamanan serta perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

2.3 Teori Peran Aktor Pemerintah

Aktor pemerintah merupakan individu atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses pembuatan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik. Dalam sistem pemerintahan modern, aktor pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk konflik sosial dan politik. Peran aktor pemerintah tidak hanya terbatas pada perumusan kebijakan, tetapi juga mencakup implementasi kebijakan serta koordinasi antarlembaga dalam mencapai tujuan pembangunan dan stabilitas nasional.

Menurut B. Guy Peters, aktor pemerintah merupakan bagian dari sistem administrasi publik yang memiliki fungsi utama dalam menjalankan kebijakan negara. Aktor pemerintah bertanggung jawab dalam merancang kebijakan, mengoordinasikan berbagai institusi pemerintah, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat nasional maupun daerah (Peters, 2010).

Selain itu, James E. Anderson dalam teori kebijakan publik menjelaskan bahwa proses kebijakan publik melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran berbeda dalam setiap tahap proses kebijakan. Tahap-tahap tersebut meliputi perumusan kebijakan (*policy formulation*), pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*), serta evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Dalam setiap tahap tersebut, aktor pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat (Anderson, 2014). Dalam perspektif administrasi publik modern, peran aktor pemerintah tidak dapat dipisahkan dari konsep *governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi antaraktor dalam proses kebijakan. Menurut Intan Fitri Meutia (2017), kebijakan publik tidak hanya dihasilkan oleh aktor pemerintah semata, tetapi juga melibatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan aktor pemerintah dalam membangun koordinasi, komunikasi, dan sinergi antarlembaga serta dengan masyarakat. Lebih lanjut, Meutia (2017) menegaskan bahwa dalam konteks permasalahan

kompleks seperti konflik sosial, peran aktor pemerintah harus mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan, baik keamanan, sosial, maupun pembangunan secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan keterlibatan multi-aktor pemerintah yang terkoordinasi dalam suatu kerangka kebijakan yang komprehensif.

Dalam konteks penyelesaian konflik, aktor pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas dan keamanan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang berkonflik. Pemerintah dapat menggunakan berbagai pendekatan dalam menangani konflik, seperti pendekatan keamanan, pendekatan pembangunan, serta pendekatan dialog politik dengan kelompok yang terlibat dalam konflik.

Menurut Duncan McCargo, pemerintah Thailand memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola konflik di wilayah Thailand Selatan melalui kebijakan keamanan serta program pembangunan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (McCargo, 2008). Pemerintah Thailand juga membentuk berbagai lembaga khusus untuk menangani konflik di wilayah selatan, salah satunya adalah *Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC)* yang berfungsi sebagai lembaga koordinasi antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal.

Selain itu, dalam proses penyelesaian konflik, aktor pemerintah juga berperan dalam membangun komunikasi dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan kebijakan penyelesaian konflik. Apabila masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah, maka kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah akan sulit untuk dilaksanakan secara efektif.

Peran aktor pemerintah dalam penyelesaian konflik juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga pemerintah. Dalam banyak kasus, konflik sosial dan politik melibatkan berbagai aspek yang membutuhkan kerja sama antara

berbagai institusi pemerintah seperti militer, kepolisian, pemerintah daerah, serta lembaga administratif lainnya. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga tersebut dapat meningkatkan efektivitas kebijakan penyelesaian konflik.

Dalam konteks konflik di Thailand Selatan, aktor pemerintah yang terlibat dalam penyelesaian konflik antara lain pemerintah pusat Thailand, militer Thailand, kepolisian, pemerintah daerah, serta lembaga administratif yang memiliki tugas khusus dalam menangani konflik di wilayah tersebut. Masing-masing aktor memiliki peran yang berbeda dalam menjaga stabilitas keamanan serta melaksanakan kebijakan pembangunan di wilayah konflik. Dengan demikian, teori peran aktor pemerintah memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana pemerintah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam proses penyelesaian konflik. Dalam penelitian ini, teori peran aktor pemerintah digunakan untuk menganalisis bagaimana berbagai lembaga pemerintah di Thailand berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian konflik di wilayah Thailand Selatan.

2.4 Teori Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu konsep penting dalam studi administrasi publik yang berkaitan dengan bagaimana organisasi pemerintahan menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melaksanakan kebijakan publik. Dalam sistem pemerintahan modern, birokrasi berperan sebagai alat negara yang bertugas mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik.

Konsep birokrasi pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang menjelaskan bahwa birokrasi merupakan bentuk organisasi yang rasional dan efisien dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Weber menyatakan bahwa birokrasi merupakan sistem organisasi yang didasarkan pada aturan formal, hierarki yang jelas, serta pembagian tugas yang terstruktur. Melalui sistem birokrasi yang terorganisasi

dengan baik, pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien (Weber, 1947).

Menurut Weber, terdapat beberapa karakteristik utama birokrasi yang menjadi dasar dalam sistem administrasi pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. **Hierarki organisasi**

Birokrasi memiliki struktur organisasi yang jelas dan bertingkat, di mana setiap posisi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. Hierarki ini memudahkan proses koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

2. **Pembagian tugas yang jelas**

Dalam sistem birokrasi, setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik sesuai dengan posisi yang dimilikinya. Pembagian tugas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan pekerjaan.

3. **Aturan formal dan prosedur administratif**

Birokrasi dijalankan berdasarkan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan secara formal. Aturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh aparatur pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. **Profesionalisme dan kompetensi pegawai**

Pegawai dalam sistem birokrasi dipilih berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, bukan berdasarkan hubungan pribadi atau kepentingan politik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi yang profesional dan objektif.

Dalam konteks kebijakan publik, birokrasi memiliki peran penting dalam proses implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya birokrasi yang

bertugas menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di lapangan.

Menurut James Q. Wilson, birokrasi merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan publik serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kinerja birokrasi yang melaksanakan kebijakan tersebut (Wilson, 1989). Namun demikian, birokrasi juga sering menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antarlembaga pemerintah yang terkadang tidak berjalan secara efektif. Kompleksitas struktur organisasi dan perbedaan kepentingan antarlembaga dapat menyebabkan proses implementasi kebijakan menjadi kurang optimal.

Selain itu, birokrasi juga dapat mengalami berbagai permasalahan seperti prosedur administratif yang terlalu rumit, lambatnya proses pengambilan keputusan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam konteks konflik di Thailand Selatan, struktur birokrasi memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik. Pemerintah Thailand melibatkan berbagai lembaga dalam menangani konflik di wilayah tersebut, termasuk militer, kepolisian, pemerintah daerah, serta lembaga administratif seperti *Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC)* yang bertugas mengoordinasikan program pembangunan dan kebijakan pemerintah di wilayah Thailand Selatan.

Koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan penyelesaian konflik dapat dilaksanakan secara optimal. Apabila koordinasi birokrasi berjalan dengan baik, maka kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak yang positif terhadap stabilitas keamanan dan pembangunan di wilayah konflik.

Dengan demikian, teori birokrasi memberikan kerangka analisis yang penting untuk memahami bagaimana struktur organisasi pemerintahan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Dalam penelitian ini, teori birokrasi digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur birokrasi pemerintah Thailand mempengaruhi implementasi kebijakan dalam penyelesaian konflik di wilayah Thailand Selatan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara dinamika konflik di Thailand Selatan dengan peran aktor pemerintah dalam upaya penyelesaiannya. Konflik yang terjadi di wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat merupakan konflik yang bersifat kompleks dan multidimensional, yang dipengaruhi oleh faktor identitas, politik, keamanan, dan sosial ekonomi. Oleh karena itu, analisis konflik dalam penelitian ini menggunakan teori konflik untuk memahami akar permasalahan dan dinamika yang terjadi di wilayah tersebut.

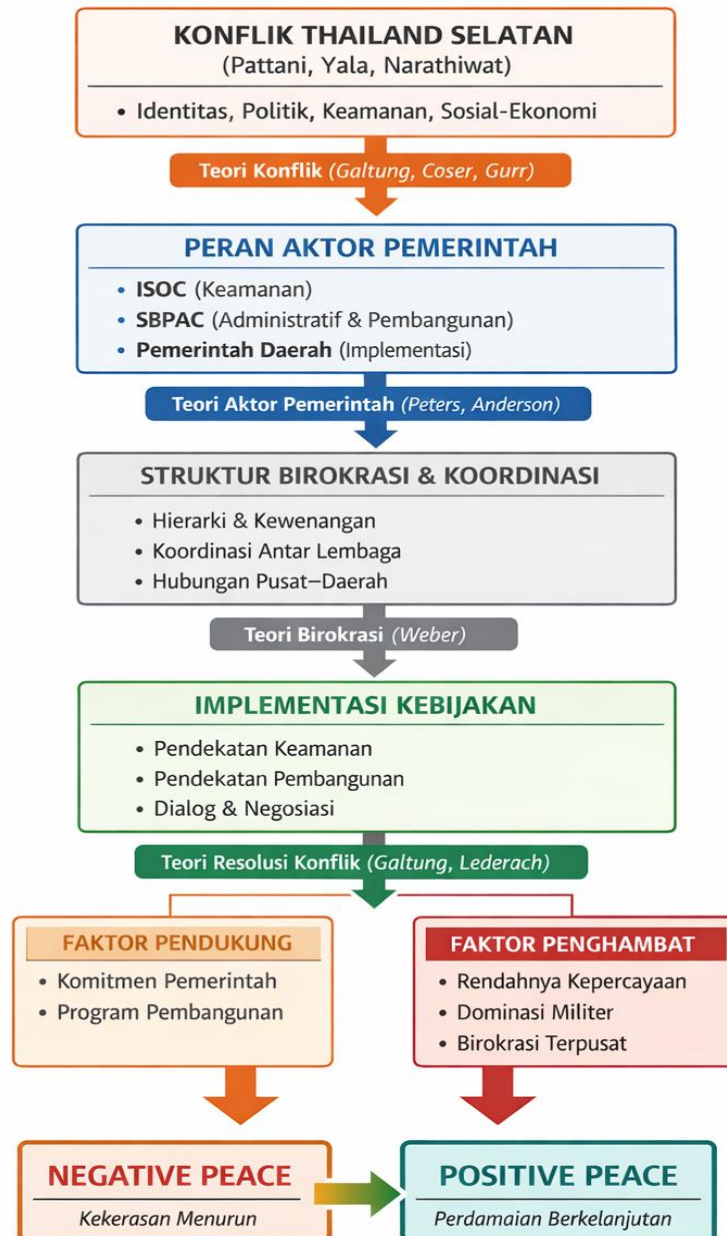
Selanjutnya, dalam upaya penyelesaian konflik, pemerintah berperan sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Peran tersebut dianalisis menggunakan teori peran aktor pemerintah, yang menekankan bahwa pemerintah terdiri dari berbagai lembaga dengan fungsi yang berbeda, seperti lembaga keamanan (ISOC), lembaga administratif (SBPAC), serta pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori birokrasi untuk menganalisis bagaimana hierarki kewenangan, pembagian tugas, serta koordinasi antar lembaga mempengaruhi implementasi kebijakan penyelesaian konflik.

Dalam tahap implementasi, pemerintah menggunakan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan keamanan, pembangunan sosial ekonomi, serta dialog dan negosiasi. Untuk menilai efektivitas pendekatan tersebut, digunakan teori resolusi konflik, khususnya konsep *negative peace* dan *positive peace*.

Hasil dari proses tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat, yang pada akhirnya menentukan apakah penyelesaian konflik hanya mencapai negative peace atau mampu menuju positive peace yang berkelanjutan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena konflik di wilayah Thailand Selatan serta menganalisis peran aktor pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai dinamika politik, sosial, dan kelembagaan yang memengaruhi proses penyelesaian konflik.

Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi konflik yang terjadi serta menjelaskan bagaimana aktor pemerintah menjalankan perannya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penyelesaian konflik. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang terjadi, tetapi juga melakukan analisis terhadap hubungan antar faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani konflik.

Penelitian ini menggunakan studi literatur (*library research*) sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber akademik dan dokumen yang relevan dengan konflik di wilayah Thailand Selatan, khususnya di provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis peran aktor pemerintah dalam penyelesaian konflik di wilayah Thailand Selatan. Fokus penelitian ini meliputi beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Peran aktor pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian konflik di Thailand Selatan.
2. Mekanisme koordinasi antarlembaga pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penyelesaian konflik.
3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat aktor pemerintah dalam penyelesaian konflik di wilayah tersebut.
4. Peran struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penyelesaian konflik.

3.3 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada wilayah konflik di Thailand Selatan yang dikenal sebagai kawasan *Deep South Thailand*, yaitu tiga provinsi utama:

3.1 Pattani

3.2 Yala

3.3 Narathiwat

Wilayah tersebut dipilih karena merupakan pusat konflik antara kelompok separatis Melayu Muslim dengan pemerintah Thailand yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Objek penelitian ini adalah aktor pemerintah yang terlibat dalam penyelesaian konflik, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk lembaga pemerintah yang berperan dalam kebijakan keamanan, pembangunan wilayah, serta dialog perdamaian di Thailand Selatan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku akademik yang membahas konflik di Thailand Selatan.
2. Artikel jurnal ilmiah internasional yang membahas konflik Pattani dan kebijakan pemerintah Thailand.
3. Laporan lembaga penelitian dan organisasi internasional, seperti International Crisis Group dan lembaga penelitian konflik.
4. Dokumen kebijakan pemerintah Thailand yang berkaitan dengan penanganan konflik di wilayah selatan.
5. Publikasi media dan laporan penelitian yang membahas perkembangan konflik di Thailand Selatan.

Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai dinamika konflik serta peran aktor pemerintah dalam penyelesaian konflik di wilayah tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen.

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan konflik di Thailand Selatan. Studi literatur bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan empiris mengenai konflik Pattani serta peran aktor pemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut.

Tabel. 3.1

No	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	Sumber / Link
1	Impact of Islamic Conflict in Pattani Thailand	Lisan Nulhasanah	2023	Jurnal Kawasan Sejarah
2	Assessing Indonesia's Diplomacy on South Thailand Conflict	Arifi & Deddy Mulyana	2020	Jurnal Ilmu Komunikasi
3	Konflik Minoritas Melayu dan Militer Thailand	Yasril Yazid		Jurnal Toleransi
4	Konflik Pemerintah Thailand vs Separatis Selatan	Yashinta Mayowi	2022	Repository UNEJ
5	Perspektif Mahasiswa Patani terhadap Nasionalisme Thailand	Ulfa Nasution & Ratnawati	2019	Jurnal Paradigma
6	Konflik Masyarakat Patani dengan Pemerintah Thailand	Seeteekholeyoh Waehama	2016	UIN SGD

7	Gerakan PULO di Thailand Selatan	Jamaludin H.S. Adib	2016	Jurnal Tamaddun
8	Muslim Minoritas dan Budaya Melayu Pattani	Novia Isti Setiarini	2021	Jurnal Penelitian Agama
9	The Southern Thailand Insurgency: Causes and Dynamics	Duncan McCargo	2008	Journal of Contemporary Asia
10	Insurgency in Southern Thailand: Causes and Consequences	International Crisis Group	2017	Report/Jurnal
11	Ethno-Religious Conflict in Southern Thailand	Marc Askew	2010	Asian Survey
12	Separatism in Southern Thailand	Surin Pitsuwan	2007	Asian Affairs
13	Violence and Identity in Southern Thailand	Michael J. Montesano	2012	ISEAS Journal
14	The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand	Zachary Abuza	2009	Terrorism Monitor
15	Conflict	Kamarulzaman	2015	Peace Studies

	Resolution in Southern Thailand	Askandar		Journal
16	State Policy and Muslim Resistance in Thailand	Thanet Aphornsuvan	2004	Asian Studies Review
17	Radicalization in Southern Thailand	Joseph Liow	2006	Studies in Conflict & Terrorism
18	Education and Conflict in Pattani	UNESCO Research	2016	UNESCO Report
19	Peace Process in Southern Thailand	Deep South Watch	2020	Research Report
20	Identity Conflict and Separatism in Pattani	Paul Chambers	2013	Journal of Politics

2. Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti laporan lembaga penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan organisasi internasional mengenai konflik di Thailand Selatan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. **Reduksi Data**

Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

2. **Penyajian Data**

Data yang telah dipilih kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan proses analisis.

3. **Penarikan Kesimpulan**

Tahap terakhir adalah melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai peran aktor pemerintah dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku akademik, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pemerintah.

Melalui teknik ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat validitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran aktor pemerintah dalam penyelesaian konflik di tiga provinsi Thailand Selatan, yaitu Pattani, Yala, dan Narathiwat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran aktor pemerintah dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan Aktor-aktor pemerintah, termasuk SBAC, ISOC, dan pemerintah daerah, telah melaksanakan fungsi dan perannya. Akan tetapi, implementasinya belum berjalan secara maksimal, sebagaimana tercermin dari masih berlangsungnya konflik
2. Mekanisme koordinasi antarlembaga pemerintah belum berjalan optimal, yang ditandai dengan *overlap* kewenangan, kurangnya sinergi, serta lemahnya integrasi kebijakan antara lembaga keamanan dan administratif.
3. Faktor pendukung dalam penyelesaian konflik meliputi komitmen pemerintah dan program pembangunan, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya kepercayaan masyarakat, birokrasi yang terpusat, serta lemahnya koordinasi antarlembaga.
4. Struktur birokrasi pemerintah yang bersifat hierarkis dan terpusat memengaruhi implementasi kebijakan sehingga kurang fleksibel dan belum efektif dalam merespons dinamika konflik di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, penyelesaian konflik masih berada pada tahap negative peace dan belum menyentuh akar konflik secara menyeluruh, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada positive peace

Dengan demikian, penyelesaian konflik di Thailand Selatan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kepercayaan masyarakat, serta reformasi birokrasi agar mampu mencapai perdamaian yang bersifat positif (positive peace) dan berjangka panjang.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan upaya penyelesaian konflik di wilayah Thailand Selatan.

1. Reformasi Kelembagaan menjelaskan demarkasi kewenangan antara ISOC dan SBPAC sebagai ujung tombak utama fase pemulihan, dengan ISOC murni pada peran perlindungan terbatas.
2. Desentralisasi Kewenangan Berikan otonomi administratif yang lebih besar kepada Pemerintah daerah. Mereka membutuhkan fleksibilitas anggaran dan kebijakan untuk merespons krisis dengan kearifan lokal.
3. Eskalasi Dialog Politik dengan mempertahankan komitmen pada perundingan damai, serta perluas keterlibatan representasi masyarakat sipil akar rumput di meja perundingan, bukan hanya elit militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Askew, M. (2008). *Thailand's Intractable Southern War: Policy, Insurgency and Discourse*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Gunaratna, R., Acharya, A., & Chua, S. (2005). *Conflict and Terrorism in Southern Thailand*. Singapore: Marshall Cavendish.
- McCargo, D. (2008). *Tearing Apart the Land: Islam and Legitimacy in Southern Thailand*. Ithaca: Cornell University Press.
- McCargo, D. (2012). *Mapping National Anxieties: Thailand's Southern Conflict*. Copenhagen: NIAS Press.
- McCargo, D. (Ed.). (2007). *Rethinking Thailand's Southern Violence*. Singapore: NUS Press.
- Melvin, N. J. (2007). *Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and the State in the Pattani Insurgency*. Stockholm: SIPRI.
- Montesano, M. J., & Jory, P. (2008). *Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula*. Singapore: NUS Press.
- Thanet Aphornsuvan. (2007). *History and Politics of the Muslims in Thailand*. Bangkok: Thammasat University Press.
- Liow, J. C. (2009). *Islam, Education and Reform in Southern Thailand: Tradition and Transformation*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Funston, J. (Ed.). (2008). *Divided over Thaksin: Thailand's Coup and Problematic Transition*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Chambers, P., Jitpiromsri, S., & Waitoolkiat, N. (2019). *Conflict in the Deep South*

- of Thailand: Never-Ending Stalemate? *Asian International Studies Review*, 20(1), 1–23.
- Croissant, A. (2007). Muslim insurgency, political violence and democracy in Thailand. *Terrorism and Political Violence*, 19(1), 1–18.
- Jitpiromsri, S., & McCargo, D. (2010). The Southern Thai Conflict Six Years On: Insurgency, Not Just Crime. *Contemporary Southeast Asia*, 32(2), 156–183.
- McCargo, D. (2006). Thaksin and the resurgence of violence in the Thai south. *Critical Asian Studies*, 38(1), 39–71.
- McCargo, D. (2009). Thai Buddhism, Thai Buddhists and the southern conflict. *Journal of Southeast Asian Studies*, 40(1), 1–10.
- McCargo, D. (2010). Autonomy for Southern Thailand: Thinking the Unthinkable? *Pacific Affairs*, 83(2), 261–281.
- McCargo, D. (2010). Thailand's National Reconciliation Commission: A flawed response to the southern conflict. *Global Change, Peace and Security*, 22(1), 75–91.
- McCargo, D. (2010). Co-optation and resistance in Thailand's Muslim south. *Government and Opposition*, 45(1), 99–113.
- McCargo, D. (2011). Informal citizens: Graduated citizenship in southern Thailand. *Ethnic and Racial Studies*, 34(5), 833–849.
- McCargo, D. (2010). Thailand's twin fires: Democracy and the southern insurgency. *Survival*, 52(4), 5–12.
- Storey, I. (2007). Insurgency in Southern Thailand. *Asian Survey*, 47(1), 94–108.
- Sugunnasil, W. (2016). The Southern Thailand conflict and the Muslim identity in Thailand. *Asian Affairs*, 47(3), 458–475.
- Wattana, S. (2006). Berjihad di Patani and the April 2004 attacks. *Critical Asian*

Studies, 38(1), 101–116.

Liow, J. C. (2006). Muslim resistance in southern Thailand. *East-West Center Policy Studies*, 24.

Funston, J. (2010). Southern Thailand: The dynamics of conflict. *Asian Affairs*, 41(3), 399–418.

Harish, S. P. (2006). Ethnic or religious conflict? Understanding the Pattani insurgency. *Contemporary Southeast Asia*, 28(1), 48–69.

International Crisis Group. (2005). Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad. *Asia Report*, No. 98.

International Crisis Group. (2012). Thailand: The Evolving Conflict in the South. *Asia Report*, No. 241.

Aphornsuvan, T. (2007). Origins of Malay Muslim separatism in southern Thailand. *Asia Research Institute Working Paper*.

Jory, P. (2013). Ghosts of the past in southern Thailand: Essays on the history and historiography of Patani.

Chaiwat Satha-Anand. (2006). Violence and truth management in southern Thailand. *Critical Asian Studies*.

Lowy Institute. (2014). *Southern Thailand: From Conflict to Negotiations*.

PRIO (Peace Research Institute Oslo). (2011). *Why So Much Conflict in Thailand?*

National Reconciliation Commission. (2006). *Overcoming Violence through the Power of Reconciliation*.

Asian Development Bank. (2015). *Development Challenges in Southern Thailand*.

United Nations Development Programme. (2010). *Human Security in Thailand's Southern Border Provinces*.

Meutia, Intan Fitri. 2017. *Governance dan Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Unila Press.

International Crisis Group. (2020). *Southern Thailand's peace dialogue*. ICG Asia Report.

International Crisis Group. (2017). *Thailand's deep south insurgency*. ICG Report.

Deep South Watch. (2024). *Conflict data in southern Thailand*. Prince of Songkla University.

SIPRI. (2007). *Conflict in Southern Thailand*. Stockholm International Peace Research Institute.

World Bank. (2019). *Conflict and development in Southeast Asia*.

REFERENSI TAMBAHAN

Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking*. Cengage Learning.

Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. Wiley.

Fukuyama, F. (2013). *What is governance?* CGD Working Paper.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation*. Princeton University Press.

Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy*. Sage Publications.

Huntington, S. P. (1968). *Political order in changing societies*. Yale University Press.

Kettl, D. F. (2002). *The transformation of governance*. Johns Hopkins University Press.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government*. Addison-Wesley.

Pressman, J., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation*. University of California Press.